

RELASI AKTOR DALAM RUANG WACANA KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DI BANYUWANGI

M. Hadi Makmur dan Ahmad Taufiq

FISIP Universitas Jember,
Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Email: makmur3@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dampak kebijakan kebudayaan yang sudah diterapkan terhadap komunitas seni dan tradisi budaya Banyuwangi, khususnya Using, untuk mendiskripsikan pola relasi antar pelaku budaya dengan pemerintah daerah, dan untuk menggambarkan konstruksi model kebijakan daerah untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal Banyuwangi, khususnya Using. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan analisis triangulasi, analisis isi, dan permodelan kebijakan. Metode untuk memperoleh data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa kebudayaan Using menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Dari hasil penelitian terkait, budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan daerah-Bupati, pelaku budaya lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, nilai ekonomis, politik, spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas dan fantasi-hiburan warga masyarakat. Beberapa dampak dari kebijakan dan relasi yang muncul adalah dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya dan bagi budaya Using sendiri.

Abstract:

The purpose of this study is to describe the impact of cultural policies that have been applied to the arts community and cultural traditions in Banyuwangi, especially Using, and also to describe the pattern of relations between cultural actors and local governments as well as to describe the construction of a model of regional policy for the preservation and development of local culture in Banyuwangi, especially Using. This study is a descriptive-qualitative research using triangulation analysis, content analysis and policy modeling. Methods for obtaining the data is observation, interviews, documentation and study of literatures and FGD. The study found that Using culture is an entity to continue to be contested in the space representation of the interests of each party. Occurred relation of each actor in a dynamic space. From the results of research related to Using culture in Banyuwangi found several groups of actors, namely the private sector, local leader-Regent, local cultural actors, community leaders and the general public. This relation, represents dialectically, values of economy, politics, spirituality, needs replication of identity, and fantasy-entertainment for community

members. Some impacts, policies and relationships that emerge are the social and economic impacts and for Using culture its own.

Kata-kata kunci:

Kebijakan, budaya Using, konstruksi identitas, komodifikasi budaya

Pendahuluan

Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan berbagai bentuk budaya di daerahnya. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan menumbuhkan sikap kritis terhadap fakta sejarah serta memperkuat ketahanan bangsa.

Kebudayaan sebagai identitas komunitas bukan hanya dipahami sebagai pembeda dengan komunitas lain, melainkan sebagai suatu hal yang dapat digunakan untuk mengenal kehidupan komunitas, cara-cara komunitas menyusun pengetahuan, menampilkan perasaan, dan cara mereka bertindak. Hal tersebut senada dengan pemikiran Taylor bahwa kebudayaan dapat diartikan sebagai pandangan hidup dari sebuah komunitas atau kelompok.¹ Aspek kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional bukan saja dinilai seberapa banyak penghargaan lencana kebudayaan dan pameran unsur kebudayaan, melainkan mengakui eksistensi serta mengakomodasi kepentingan setiap komunitas dan budaya lokal dalam kehidupan berbangsa.

Perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem desentralistik, sebagaimana termaktub dalam UU No.32 tahun 2004, membawa konsekuensi terjadinya perubahan terhadap pengelolaan dan pelestarian budaya bangsa. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menempatkan peran pemerintah yang semula merupakan operator tunggal dalam pelestarian warisan budaya, selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pelestarian budaya. Di samping itu, otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam upaya pelestarian budaya, dengan harapan bahwa sumber daya budaya harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tetapi di sisi yang lain, dampak dari otonomi daerah, dengan adanya tuntutan kemandirian fiskal, mendorong pemerintah daerah cenderung berlomba-lomba bagaimana segala sesuatunya ditarik pada ranah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Selain itu, segala entitas sosial termasuk entitas budaya juga ditarik oleh para pihak dalam pusaran politik praktis kekuasaan di tingkat daerah, sehingga kebijakan tertentu seringkali digunakan untuk kepentingan pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan untuk memertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap penguasa eksekutif dan legis-

¹ G. Ritzer dan D.J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2008)

latif suatu wilayah. Tak jarang kebijakan daerah termasuk kebijakan terkait kebudayaan tersebut menjadi semacam ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan untuk menunjukkan secara artifisial identitas mereka terhadap kepentingan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, termasuk komunitas budaya. Sehingga dikawatirkan kebijakan daerah terkait pengembangan dan pelestarian kebudayaan dibiarkan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan kekuasaan politik lokal, yang justru kontra produktif dengan maksud pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu sendiri.

Pada penelitian awal ditemukan bahwa seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Muncul dan berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yaitu rehabilitasi dan kontrol kebudayaan, pembentukan identitas utama/pusat kebudayaan dan wacana identitas dan promosi kebudayaan. Terdapat tiga bentuk strategi dan program yang telah dijalankan dalam Kebijakan kebudayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu pengembangan pendidikan, pembangunan simbol atau situs, dan penyiaran, pementasan dan pagelaran karya kebudayaan lokal, termasuk budaya Using.

Untuk mengetahui konstruksi model kebijakan daerah untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan di tingkat lokal di tengah dinamika ekonomi dan politik di tingkat lokal juga interaksi komunitas kultural, maka selanjutnya perlu diteliti untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan kebudayaan terhadap komunitas kebudayaan, juga relasi antar komunitas juga dengan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, sehingga akan terdeskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan wilayah penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi, namun yang lebih penting adalah untuk menyampaikan kedalaman informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain teknik penentuan informan, adalah dengan metode *purposive* (bertujuan) yang dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut,² yaitu orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.³ Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah 6 (enam) informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2 (dua) informan dari Dinas Pendidikan, dan 3 (tiga) informan dari tokoh budaya dan pegiat kesenian tradisi Banyuwangi.

Metode untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 218.

³ Budi Raharjo, *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 12

dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan keabsahan dan kepercayaan data, peneliti melakukan triangulasi data baik secara metode maupun sumber. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model Milles & Huberman, mulai dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁴

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan dan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Menurut aliran komutarianisme, yang dikumandangkan oleh Etzioni,⁵ kebijakan publik dalam masyarakat modern telah kehilangan *sense of community*, kebijakan pembangunan mengantarkan pada sebuah kondisi masyarakat yang teralienasi, tercerabut dari kerangka kepercayaan etis, tradisi, dan solidaritas, karena kebijakan publik lebih mengedepankan akomodasi kehidupan individualisme dan mekanisme pasar.

Pandangan kelompok ini, dalam kebijakan publik, memberikan pesan bahwa selayaknya kebijakan publik tidak saja mengarah pada persoalan-persoalan pembangunan, pertumbuhan, ekonomi

tetapi perlu kebijakan yang mengarah pada solidaritas, persaudaraan dengan perlindungan terhadap keberadaan tradisi, seni dan produk budaya masyarakat.

Pandangan komutarianisme itu relevan jika melihat kebijakan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi daripada kultural. Kebijakan terhadap pelestarian dan pengembangan budaya, misalnya, cenderung sebatas penyelenggara pagelaran kegiatan kesenian atau tradisi lokal, yang lebih dimaknai secara ekonomis. Seperti yang disampaikan Lindsay bahwa kebijakan saat ini telah mengubah dan merusak budaya, tradisi, seni-seni, melalui campur penanganan yang berlebihan dan kebijakan ke arah komodifikasi, dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah dalam konteks substansi budaya.⁶

Kebijakan pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal berubah menjadi pengelola kegiatan yang menentukan objek dan merubah agar sesuai dengan tuntutan pembangunan, yaitu peningkatan pendapatan daerah. Dalam kondisi ini, budaya, seni, dan tradisi yang digelar menjadi sekedar raga tak berisi. Komunitas tradisi dan seni lebih dipandang sebagai objek dan diharapkan menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang konsumeristik.

Hal ini tentu saja tidak sinergis dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009/No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam melestarikan

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 246

⁵Wayne Parson, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 53.

⁶Jennifer Lindsay, *Cultural Policy And The Performing Arts In South-East Asia*, pada <http://www.kitlvml-journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/173>. Diakses pada 10 Naret 2011.

kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, kemajuan peradaban, persatuan, dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga perlu dilakukan pelestarian kebudayaan. Terkait peran pemerintah daerah, berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Pada era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa.

Kebudayaan sendiri, menurut E.B. Taylor adalah kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁷ Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif. Artinya, ia mencakup segala cara atau pola berfikir, merasakan, dan bertindak.

Sehingga kebijakan pemerintah, dalam konteks ini, seharusnya diarahkan untuk mengembangkan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi pelaksanaan dialog kebudayaan dan mendorong reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional.⁸ Sebab seperti yang Amartya Sen sampaikan bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh kepercayaan yang bersumber dari norma budaya baik eksplisit maupun implisit.⁹

2. Masyarakat Using dan Budayanya

Salah satu ciri yang dominan sebagai pembeda masyarakat adat etnik Using dengan etnik non Using di Banyuwangi adalah bahasa Using yang dipakai oleh etnik Using. Di samping penggunaan bahasa Using, masyarakat Using juga mengembangkan potensi kesenian dan kebudayaan termasuk adat istiadat yang mampu ditelusuri sebagai hasil pewarisan dari leluhur masyarakat Using, yaitu masyarakat Kerajaan Blambangan.

Latar belakang perkembangan bahasa Using di Blambangan (dan sekarang di Banyuwangi), antara lain karena faktor sejarah perkembangan kekuasaan Majapahit yang menguasai Blambangan pada 1295-1527. Setelah Majapahit runtuh,

⁸ Bappenas, *Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Luhur*, <http://www.Bappenas.Go.Id/Get-File-Server/Node/8403/>. Diakses pada 1 Juli 2011.

⁹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 326

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 172.

Blambangan sering menjadi perebutan kekuasaan kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Demak dan kerajaan-kerajaan di Bali (Kerajaan Gel-gel, Kerajaan Buleleng, dan Kerajaan Mengwi), sebelum akhirnya dikuasai oleh VOC pada 1774. Latar belakang sejarah Blambangan ini mengu- atkan anggapan bahwa penggunaan Ba- hasa Kawi yang digunakan dalam komu- nikasi waktu itu di Nusantara juga digu- nakan oleh masyarakat Blambangan.¹⁰

Selain bahasa Using sebagai bahasa yang memiliki struktur yang berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa- bahasa lain di sekitarnya, struktur dan pola kesenian Using berkembang de- ngan ciri-ciri yang berbeda bila dikaitkan dengan kebudayaan etnik non-Using la- innya. Perkembangan kebudayaan Using itu antara lain dihasilkan dari pola pe- warisan kebudayaan Blambangan, juga karena faktor akulturasi budaya dengan kebudayaan non-Using lainnya. Hal ter- sebut dimungkinkan terjadi mengingat sejarah perkembangan peradaban Using yang terbentuk oleh faktor-faktor sosio- kultural yang ada di Banyuwangi.

Faktor sosio-kultural tersebut dise- babkan antara lain karena keadaan alam yang demikian sulit menjadikan Blam- bangan menjadi daerah yang terisolasi dari perkembangan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Karenanya meskipun daerah- daerah lain telah dikuasai oleh VOC, Blambangan baru dikuasai oleh Belanda pada 1774 setelah peperangan berke- panjangkan antara putra-putra Blamba- ngan. Kemudian demi kepentingan Be- landa dalam mengeksploitasi tanah jajah- an, Belanda membangun fasilitas-fasilitas perekonomian di bumi Blambangan.

¹⁰ Erika Sujana, *Etnis Jawa* (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 36

Dalam rangka pembangunan kepentingannya itu, Belanda menda- tangkan penduduk secara besar-besaran dari luar Blambangan. Program ini cukup berhasil menambah jumlah penduduk Blambangan, hingga diuraikan pada penduduk Blambangan pada 1750 hanya berjumlah 8.000 dan pada awal abad 19 penduduk Banyuwangi mencapai popu- lasi sebesar 200.000 orang.¹¹

Identitas budaya suatu masyarakat tertentu selalu menghadirkan pandangan streotipe. Begitu pula halnya dengan identitas budaya Using. Masyarakat U- sing diprasangkai sebagai sosok yang kasar (tidak punya tata krama), longgar dalam nilai, terutama yang terkait dengan hubungan antar lawan jenis, dan memi- liki ilmu gaib destruktif yang disebut santet, pelet, sihir, dan sebangsanya.¹² Di samping citra negatif tersebut, masya- rakat Using juga dikenal memiliki citra positif yang membuatnya dikenal luas dan dianggap sebagai aset budaya yang produktif, yaitu (1) ahli dalam bercocok tanam; (2) memiliki tradisi kesenian yang handal; (3) sangat egaliter, dan (4) terbu- ka terhadap perubahan.¹³

Masyarakat Using bukan hanya ulet dan mahir dalam bercocok tanam, melainkan juga piawai dalam berke- senian. Eksistensinya membuat Kabu- paten Banyuwangi menjadi gudang produk-produk kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Ti- mur.

¹¹ Ibid., hlm. 47

¹² Andang Subahianto, "Mitologi Buyut Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi", *Laporan Penelitian* (Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. (Subahianto, 1996), hlm. 3.

¹³ Ayu Sutarto, Ayu "Etnografi Masyarakat Using", *Laporan Penelitian* (Surabaya: Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur, 2003)

Produk-produk kesenian Using bukan hanya menghibur, tetapi juga banyak mengandung nilai perjuangan dan perlawanan terhadap kekuatan asing yang merugikan. Banyak sekali pesan-pesan mulia yang terkandung dalam syair-syair baik yang dilantunkan dalam kendang kempul maupun hadrah Kuntulan Using dan dalam seni tari tradisional Using, seperti Gandrung dan Seblang. Jelasnya, produk budaya Using memiliki dua warna, yaitu produk budaya yang bercitra agraris dan produk yang bercitra patriotik.

Masyarakat Using, meskipun menjadi pemeluk Agama Islam, telah memelihara tradisinya dengan baik dan tidak mempertentangkan nilai agama dengan tradisi. Dalam masyarakat Using, agama dan tradisi saling mengisi. Agama seringkali sebagai kekuatan yang lebih dominan mewarnai tradisi. Akibatnya, tidak sedikit unsur-unsur agama maupun kepentingan agama mewarnai produk kesenian Using. Produk-produk kesenian Using yang bercitra agraris dapat dimanfaatkan sebagai perekat dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, sedangkan yang bercitra patriotik dapat dimanfaatkan untuk membangun nasionalisme.

Masyarakat Using dikenal sangat kaya akan produk-produk kesenian. Dalam masyarakat Using, kesenian tradisional masih tetap terjaga kelestariannya, meskipun ada beberapa yang hampir punah. Kesenian pada masyarakat Using merupakan produk adat yang mempunyai relasi dengan nilai religi dan pola mata pencaharian di bidang pertanian. Laku hidup masyarakat Using yang masih menjaga adat serta pemahaman mereka terhadap pentingnya kesenian sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan

masyarakat petani telah menjadikan kesenian Using tetap terjaga hingga sekarang.

Interaksi budaya antara sisa-sisa penduduk Blambangan dengan para migran dari Jawa dan Madura membentuk struktur dan pola kesenian tradisional Using di Kabupaten Banyuwangi, antara lain meliputi: (1) Seni pertunjukan tradisional Using yang berhubungan dengan religi (animisme-dinamisme), antara lain Seblang, Singo Barong, dan Gandrung; (2) seni pertunjukan tradisional Using yang berhubungan dengan religi (Hindu-Bali), antara lain Bali-balian dan Damarwulan; (3) seni pertunjukan tradisional Using yang berhubungan dengan religi (Islam), antara lain Kuntulan, Mocoan Lontar, Mocoan Campursari, Rengganis/Praburara, dan Patrol Using; (4) seni pertunjukan tradisional Using yang berhubungan dengan kesenian Jawa, antara lain Kendang Kempul Campursari, Ketoprak, dan wayang kulit; (5) seni pertunjukan tradisional Using profan, antara lain Angklung Paglak (musik); Tari Tradisional Using Modifikasi (ciptaan pengembangan modern); dan Kendang Kempul Blambangan (musik).

Gambaran Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 KM². Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Di samping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehu-

tanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasar PSE tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 463.196 atau sejumlah 157.347 RTM. Adapun berdasarkan hasil PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar 129.324 keluarga dengan jumlah penduduk miskin sebesar 312.395 jiwa.

Pluralitas dalam kehidupan mewarnai masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dari sisi keagamaan, masyarakat Banyuwangi terdiri dari Islam dengan pemeluk sebesar 1.386.633 jiwa (95,33%), Hindu sebanyak 35.958 jiwa (2,47%), Protestan sebanyak 16.503 jiwa (1,13%), Katolik sebanyak 9.016 jiwa (0,62%), dan pemeluk agama Budha termasuk Khong Hu Chu sebanyak 6.471 jiwa (0,44%). Sementara keragaman etnis-etnis yang ada, jumlah etnis Jawa paling dominan, disusul etnis Using dan etnis Madura.

Relasi Aktor dalam Ruang Kebijakan Kebudayaan

Kebudayaan di sini menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Di sini, terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Bagi bupati, sebagai penguasa atau pimpinan pemerintahan daerah, kebudayaan Using dihardirkan sebagai entitas yang memiliki makna potensial, baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, budaya yang berkembang di Banyuwangi, seperti budaya Using, menjadi sumber potensial bagi perkembangan pendapatan

daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga entitas budaya dikemas dan dipromosikan sedemikian rupa menjadi komoditas yang bisa dinikmati dan menarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti pada saat kepemimpinan Bupati Azwar Anas, keberagaman budaya Banyuwangi dikemas dalam program rutin tahunan dalam bentuk Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), yang diakuinya sangat besar sumbangannya bagi penerimaan daerah. Secara politik, bahwa hampir semua bupati di Banyuwangi, sejak Masa Bupati Supaat sampai Bupati Azwar Anas, berupaya untuk menunjukkan pada masyarakat sebagai konstituennya akan kepedulian dan perhatiannya pada budaya melalui kebijakan dan program mereka. Seni dan tradisi Using di sini sebagai sarana bagi pemimpin untuk menunjukkan akan diri mereka sebagai yang peduli dan membesarkan identitas budaya "*wong Banyuwangi*" atau setidaknya membuat teridentifikasi "*kebanyuwangian*"-nya. Atas hal ia patut untuk didukung dan mendapatkan legitimasi oleh kelompok masyarakat di Banyuwangi, khususnya Using.

Bagi pelaku dan pegiat seni dan tradisi budaya, kebudayaan bagi mereka lebih sebagai sarana ekspresi jiwa dan spiritualitas yang menunjukkan akan identitas mereka sebagai sebuah entitas kelompok yang hidup di Banyuwangi. Tetapi, mereka juga tidak berada dalam realitas hidup yang hampa, sehingga seni dan tradisi yang mereka lakukan hadir sebagai bentuk pertunjukan yang diper-tontonkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aundien. Dalam konteks itu, mereka membuat kreasi seni dan tradisi sebagai pertunjukan sebagai pengakuan komunitas mereka sekaligus menjadi komoditas yang patut untuk mendapatkan

upah dari kreasi dan kehadiran mereka. Bagi masyarakat Banyuwangi bahwa pertunjukan atau even budaya yang ditonton dan dinikmati menjadi sarana pemenuhan kebutuhan akan fantasi-hiburan sekaligus juga memperteguh diri sebagai orang Banyuwangi atau setidaknya sebagai replikasi identitasnya. Sementara itu, bagi tokoh masyarakat, kebudayaan Using merupakan ruang pertarungan antara nilai. Kehadiran kebudayaan sebagai sarana untuk memertahankan nilai-nilai kedaerahan atau loyalitas yang ada. Sedangkan bagi swasta, kebudayaan lebih kuat dimaknai sebagai ruang potensial secara ekonomi, yang bisa menjadi peluang yang menghasilkan keuntungan. Sehingga bagi mereka bagaimana sebuah entitas budaya seperti budaya Using juga bisa dikembangkan dan dikemas secara baik sehingga bisa ditawarkan kepada “pasar” yang bisa mengundang “konsumen”, yaitu masyarakat wisatawan sebesar-besarnya.

Dampak dari Kebijakan Pemerintah dan Relasi Aktor terhadap Budaya Using

Dari kebijakan dan program pemerintah daerah Banyuwangi serta relasi kantor yang ada, dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri. Secara sosial, program dan kebijakan pemerintah daerah, seperti BEC, setidaknya membawa dampak sosial. Dari beberapa budaya lokal yang direpresentasikan, secara bersama-sama memberi implikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Banyuwangi yang sangat multietnis memerlukan tingkat toleransi yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diadakannya BEC dan Festival Kuwung sejak 2010, misalnya, secara sosial sebagai

masyarakat merasa identitas multi-kultural Banyuwangi. Seperti dalam festival Kuwung, ruang untuk berperan dan merepresentasikan setiap kelompok terwadahi dalam sebuah wadah masyarakat Banyuwangi yang multikultur.

Implikasi Budaya dari kebijakan, mempromosikan Banyuwangi sebagai kota yang memiliki sejarah yang panjang dan budaya yang sangat beragam, Kabupaten Banyuwangi sebagai sebuah kota yang sangat antusias menghadirkan budaya lokal. Hal-hal yang bernuansa kelokalan dibangkitkan kembali. Kebijakan pemerintah dengan dukungan semua pihak menunjukkan komitmen untuk melakukan revitalisasi budaya yang sesuai dengan tuntutan kekinian. Kebudayaan menjadi sesuatu yang bersifat transformatif, yang terus bergerak membentuk modelnya dari waktu ke waktu. Dalam konteks yang substantif, kebijakan dan relasi yang ada menjadi ruang dialektik yang melibatkan sebagian besar para aktor untuk terus turut serta memikirkan dan merencanakan model pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Banyuwangi.

Bagi kehidupan masyarakat di zaman sekarang yang “kapitalistik”, diakui atau tidak, masyarakat memerlukan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Masyarakat awam yang tidak berkepentingan dengan pelestarian budaya secara langsung akan tidak paham jika dijelaskan tentang wacana-wacana tentang pelestarian budaya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan sesuatu yang bersifat nyata dan memberikan mereka manfaat terutama secara material. Di saat yang sama, mereka juga bisa turut serta melestarikan budaya lokal. Hasi-buan yang disitir Juliawati menyampaikan bahwa kesanggupan suatu satuan budaya untuk memertahankan kese-

jatiannya dalam pertemuan antar budaya yang demikian majemuknya itu sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya derajat kesadaran budaya dan tangguh atau rapuhnya tingkat kesadaran budaya masyarakat pendukungnya.¹⁴

Kebijakan terkait budaya di Banyuwangi dari sisi ekonomi dapat dilihat seperti dari kegiatan terkait budaya, seperti BEC, festival Kuwung, dan Paju Gandrung, secara langsung telah memberikan nilai tambah secara ekonomis, setidaknya di lapangan para pedagang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Hal ini juga diakui oleh Bupati Anas bahwa keberhasilan Banyuwangi menurunkan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen adalah berkat strategi keroyokan dari banyak sektor, termasuk sumbangan dari sektor pariwisata.¹⁵ Langkah yang ditempuh mulai dari penataan wisata, membuka destinasi wisata baru, membuat berbagai even skala nasional dan internasional yang mampu mengundang banyak wisatawan. Seni dan tradisi budaya lokal dipromosikan secara maksimal dan dapat menambah nilai jualnya. Implikasi ini sejalan dengan maksud ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif merupakan sebuah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dikomersialkan.

Penutup

Kebudayaan di sini menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Di sini terjadi

relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis.

Dari hasil penelitian terkait budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan pemerintah daerah-Bupati, pelaku dan pegiat budaya lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Relasi para aktor dalam ruang kebudayaan hidup dalam konteks yang berkembang yaitu otonomi daerah dan globalisasi. Dari relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, baik ekonomis, politik, nilai-spiritualitas maupun kebutuhan replikasi identitas sekaligus kebutuhan fantasi-hiburan warga masyarakat. Dari kebijakan dan program pemerintah daerah Banyuwangi serta relasi kantor yang ada, dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri.

Dari hasil sementara penelitian ini maka beberapa hal yang peneliti sarankan, yaitu pada pemerintah daerah agar pengembangan budaya Using terus tetap melibatkan pelaku budaya Using. Perlu ditemukan sebuah kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berbasis pada dinamika dan konteks sosial masyarakat. []

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. *Laporan Akhir Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009*
- Bappenas. *Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur*. <http://www.Bappenas.Go.Id/Get-File-Server/Node/8403/>. Diakses pada 1 Juli 2011
- Lindsay, Jennifer. *Cultural Policy And The Performing Arts In South-East Asia*, <http://www.kitlv->

¹⁴ Juliawati, *Ruang antar Budaya*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2012), hlm. 36.

¹⁵ kompas.com, diakses pada 17 Agustus 2014.

- journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/1735/2496. Diakses pada 10 Maret 2011.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Parson, Wayne. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sari, Dias Mustika. *Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sociolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Using di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Jember, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Subaharianto, Andang. *Mitologi Buyut Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi*. Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sutarto, Ayu. *Etnografi Masyarakat Using*. Laporan Penelitian pada Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur, 2003.
- Sutarto, Ayu. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawida, 2004.

